

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengangguran

a. Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2008) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Menurut Simanjutak (2003) mengatakan bahwa pengangguran yaitu orang berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Menurut Putong (2008) kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya adalah usia yang tida dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif diatas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD-tamat SMA). Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapatlah dikategorikan penganggur., meski hal ini masih banyak yang memperdebatkannya.

Pengangguran terjadi karena adanya ketidak seimbangan dipasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja dikenal kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja menunjukkan jumlah tenga yang akan ditawarkan oleh rumah tangga dan berslope positif terhadap upah. Kesimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu (Widiyanti, 2016).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan peroduktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi perunit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingkat pengangguran (Todaro, 2000).

Menurut Nanang (2004) produktivitas tenaga kerja menentukan kondisi permintaan tenaga kerja, apabila produktivitas tenaga kerja itu rendah otomatis akan menurunkan pencapaian target perusahaan. Produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para tenaga kerja sehingga akan meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Menurut Abbas (2010) kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang diberikan di dunia pendidikan dasarnya terkait dengan lima hal yaitu: motif atau penggerak, kecepatan bereaksi, gambaran diri pribadi, informasi seseorang yang diperoleh pada bidang tertentu dan kemampuan melaksanakan tugas secara fisik maupun mental (*skill*).

Tenaga kerja yang berkualitas dan lebih mempunyai kemampuan akan lebih dihargai jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang mampu.

Tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran karena tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit mendapat pekerjaan sehingga akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran.

Menurut Aqil (2014) bahwa investasi memiliki peran penting dalam pembentukan lapangan pekerjaan, dengan adanya investasi akan menambah persediaan barang modal, hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran. Berdasarkan jenisnya, investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu investasi yang sumber danya berasal dari luar negeri disebut dengan Penanaman Modal asing (PMA) dan investasi yang berasal dai dalam negeri yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Mankiw (2003) bahwa pengangguran juga disebabkan oleh kekuatan upah yaitu kegaglan upah dalam menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Salah satu hal yang menyebabkan kekakuan upah adalah undang-undang kebijakan upah minimum. Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan bahawa upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja atara pengusaha.

b. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2006) sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada empat jenis yaitu :

- 1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
- 2) pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi.
- 3) Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
- 4) Pangangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

Teori Pendekatan penggunaan tenaga kerja (Labor Utilitization approach) pendekatan ini menitik beratkan pada seseorang apakah cukup dimanfaatkan dalam kerja di lihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini dibedakan angkatan kerja dalam tiga golongan yaitu :

- Menganggur, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.
- Setengah menganggur, yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan.
- Bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan.

Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran tersebut perlu diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri yaitu :

- Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama).
- Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan dimensi di atas pengangguran dapat dibedakan atas (BPS 2000, h.8) yaitu :

- Pengangguran terbuka, baik terbuka maupun terpaksa secara sukarela, mereka tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik sedangkan pengangguran terpaksa, mereka mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Setengah pengangguran (Under Unemployment) yaitu mereka yang bekerja dimana waktu yang mereka gunakan kurang dari yang biasa mereka kerjakan.
- Tampaknya mereka bekerja, tetapi tidak bekerja, secara penuh. Mereka digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Yang termasuk dalam katagori ini adalah pengangguran tak kentara, pengangguran tersembunyi dan pensiunan awal.

c. Dampak Pengangguran

1) Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian

Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan yang mantap dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan

masyarakat mencapai tingkat pengguna tenaga kerja penuh, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari berbagai akibat buruk sifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian (Samuelson, h. 326) adalah :

- Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang di capai adalah lebih rendah dari tingkat yang akan dicapainya.
- Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
- Pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini jelas bahwa penganggur tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. Dari ketiga penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dampak dari pengangguran tidak mampu untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek.

2) Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat

Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, dampaknya adalah sebagai berikut:

- Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para pengangguran memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran dan oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya, sedangkan di negara-negara berkembang tidak terdapat program asuransi berkembang.
- Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya ketrampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila ketrampilan tersebut digunakan dalam praktek.
- Pengangguran dapat pula menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat dapat meningkatkan kriminalitas serta kurangnya keamanan.

2. Jumlah Penduduk

a. Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha untuk membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. (Sukirno, 2005 :142). Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu : fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk (Subagiarta, 2006:10).

b. Teori Jumlah Penduduk

Menurut Yasin (2007 : 5) pertumbuhan penduduk dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$$

Dimana:

P_o = jumlah penduduk pada waktu terdahulu (tahun dasar).

P_t = jumlah penduduk pada waktu sesudahnya (tahun ke t).

B = kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

D = kematian yang terjadi pada jangka waktu antara dua kejadian tersebut.

Mo = migrasi keluar pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

Mi = migrasi masuk pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.

Dalam teori penduduk, Thommas Robert Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan (Mantra, 2000 : 34). Selanjutnya Malthus sangat prihatin bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh penduduk untuk berlipat dua jumlahnya sangat pendek, ia melukiskan bahwa apabila tidak dilakukan pembatasan, penduduk cenderung berkembang menurut deret ukur. Sehingga, tegadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Dalam waktu 200 tahun, perbandingan itu akan menjadi 256 : 9. (Mantra, 2000 :35).

Michael Thomas Sadler yang mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada disuatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. (Mantra, 2000 ; 37). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menurut Lincoln akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. (Arsyad, 2004 : 267).

c. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran

Variabel jumlah penduduk menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengangguran. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Pitartono (2012) mengemukakan bahwa angka koefisien korelasi sebesar 0,755 yang berarti jumlah penduduk berhubungan kuat dengan tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Koefisien korelasi bertanda positif, berarti semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula tingkat pengangguran, demikian sebaliknya. Tanda ** menunjukkan bahwa koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 99% atau resiko kesalahan pengambilan keputusan adalah sebesar 1%.

Dari hasil tersebut maka jumlah penduduk di Jawa Tengah semakin besar akan berhubungan dengan tingkat pengangguran yang naik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi berarti kesempatan kerja akan meningkat. Bila naiknya jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan naik.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah (BPS Indonesia, 2016).

Menurut *United Nation Development Programme*(UNDP), indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:

- 1) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
- 2) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- 3) *Acces to resorce*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil per kapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), perhitungan metodologi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011 telah mengalami perubahan. Terdapat beberapa indikator yang berubah diantaranya, yaitu:

- Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya, yaitu:

- 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM yaitu indikator angka melek huruf sudah tidak relevan dalam

mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah engan baik dan indikator PDB per unit kapita tidak dapat menggambarkan pendapatn masyarakat pada suatu wilayah.

- 2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Beberapa keunggulan penghitungan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru yaitu:

- 1) Menggunakan Indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) yaitu:
 - Memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- 2) Menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, maka ketiga dimensi ini harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya Produk Nasional bruto (PNB) per kapita.

Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam saputra (2011), menetapkan peringkat kerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100 dengan kategori sebagai berikut:

IPM lebih dari 80,00	: Tinggi
IPM antara 66,0-79,9	: Menengah Atas
IPM antara 50,0-65,9	: Menengah Atas
IPM kurang dari 50,00	: Rendah

b. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran

Teori perumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran.

Menurut teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap

kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut hukum Okun (*Okun's Law*) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan beberapa teori pengangguran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengangguran mempunyai hubungan yang negatif melalui tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya ketika nilai IPM rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah tersebut.

4. Angkatan Kerja

a. Pengertian Angkatan Kerja

Menurut kamus besar bahasa Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja, sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengertian tenaga kerja pun sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja, hanya penduduk yang telah mencapai usia minimumlah yang baru bisa dianggap sebagai tenaga kerja. Sedangkan untuk usia

14 tahun keatas (remaja) yang mempunyai tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja, sebenarnya mereka tidak dihitung sebagai angkatan kerja karena mereka yang masih bersekolah, juga wanita yang mengurus rumah tangga/keadaan fisik tidak bekerja/tidak mencari pekerjaan tidak dikatakan sebagai angkatan kerja (Payman J. Simanjuntak, 1985).

Sedangkan pengertian angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang lamanya bekerja paling sedikit dua hari.
- b. Mereka selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah pekerja tetap pada kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena seminggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang dan sebagainya.

Maka dapat ditarik kesimpulan angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara optimal disebut pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga

tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan adalah:

- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, mereka yang pernah bekerja, pada saat menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Mereka yang sedang di bebas tugaskan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- c. Mereka yang bebas tugas dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi.

Berikut adalah rumus untuk mencari jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja:

$$\text{Angkatan Kerja} = \text{Yang Bekerja} + \text{Pangangguran}$$

b. Hubungan Angkatan Kerja dengan Pengangguran

Variabel ketenagakerjaan mempunyai hubungan yang positif dengan pengangguran. Dalam penelitian Pangastuti (2015) mengemukakan bahwa hasil estimasi persamaan regresi selama tahun pengamatan tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran mempunyai pengaruh positif. Besarnya koefisien 2.480002 yang berarti ketika semakin tinggi tingkat upah 23 maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 2.480002% / tahun di Jawa Tengah.

Ketika pengangguran meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya pergeseran struktur perekonomian. Pengaruh pengangguran meningkat dikarenakan tidak adanya ketersediaan kesempatan kerja yang memadai sesuai dengan kriteria pencari kerja. Alasan lain yaitu tingginya proses migrasi penduduk di suatu daerah juga akan menimbulkan kesenjangan pengangguran di suatu daerah tertentu.

5. Investasi

a. Pengertian Investasi

Jogiyanto (2008) mengartikan investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Sunariyah (2003:4) mendefinisikan investasi sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (domestic fixed capital formation) (Fatimah dalam Suindyah, 2009).

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang - barang modal dan peralatan - peralatan produksi dengan tujuan untuk menggantikan dan terutama menambah barang - barang modal dalam

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian (Sadono, 2005:121). Peranan investasi terhadap kapasitas produksi memang sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara multiplier effect. Faktor produksi akan mengalami penyusutan sehingga akan mengurangi produktivitas tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi tersebut.

b. Jenis-Jenis Investasi

Jogiyanto (2008) membedakan investasi ke dalam aktiva keuangan menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut: Investasi Langsung, Investasi Tidak Langsung. Investasi Langsung (*Direct Investment*) dimana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini merupakan aset-aset riil (*real assets*) yang melibatkan aset berwujud, misalkan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Sedangkan Investasi Tidak Langsung (*Portfolio Investment*) dimana investor dapat melakukan investasi namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegangnya dalam bentuk saham dan obligasi. Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual saham dan atau mata uang dalam jangka waktu

yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Sukirno (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi atau pembentukan modal yang akan dilakukan dalam perekonomian adalah sebagai berikut: Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*), Suku Bunga, Kemajuan Teknologi.

Besarnya investasi yang terjadi di masyarakat akan sangat mempengaruhi besarnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru. Adanya kesempatan kerja baru akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran, sehingga antara investasi dan pengangguran memiliki korelasi negatif. Hal ini berarti jika tingkat investasi naik maka tingkat pengangguran akan turun, dan begitu sebaliknya apabila investasi turun, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Namun apabila investasi yang ditanamkan bersifat padat modal, maka kenaikan investasi tidak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja.

c. Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan teori Harrod Domar dalam Kurniawan (2010:6) dan Eita (2010:15). Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi "*full employment*". Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan

begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak – banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.

6. Upah Minimum Provinsi (UMP)

a. Pengertian Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi (Sumarsono, 2009). Sedangkan menurut Gilarso (2001) upah yaitu tarif balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun.

Upah mempunyai dua pengertian menurut Sukirno (2005), yaitu :

- 1) Upah uang. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- 2) Upah riil. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

b. Sistem Upah

Menurut Gilarso (2001), sistem upah dibagi menjadi:

- 1) Upah menurut prestasi. Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai)

- 2) Upah waktu. Merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa dan administrasi dapat sederhana. Di samping itu perlu pengawasan apakah si pekerja bekerja selama jam kerja.
- 3) Upah borongsn. Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah kerja ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lain-lain.
- 4) Upah premi. Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi “normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, ekerja tersebut diberi “premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and nation study*.
- 5) Upah bagi hasil. Bagi hasil merupakan cara ang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih, direksi sebuah perusahaan mendapat tantieme bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam

perusahaan tempat bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

- 6) Peraturan gaji pegawai negeri. Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan dua prinsip: pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

c. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran

Menurut Gilarso (2002) dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja di mana kenaikan upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan berkurang. Dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah naik maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja karena perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja, sehingga jumlah pengangguran akan meningkat.

Mankiw (2003) juga berpendapat bahwa adanya pengangguran adalah kekakuan upah (*wage rigidity*) atau gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaanya. Upah yang lebih rendah mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Keynes menulis dalam "*The General Theory*" bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah turun.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016). Menurut Sadono Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

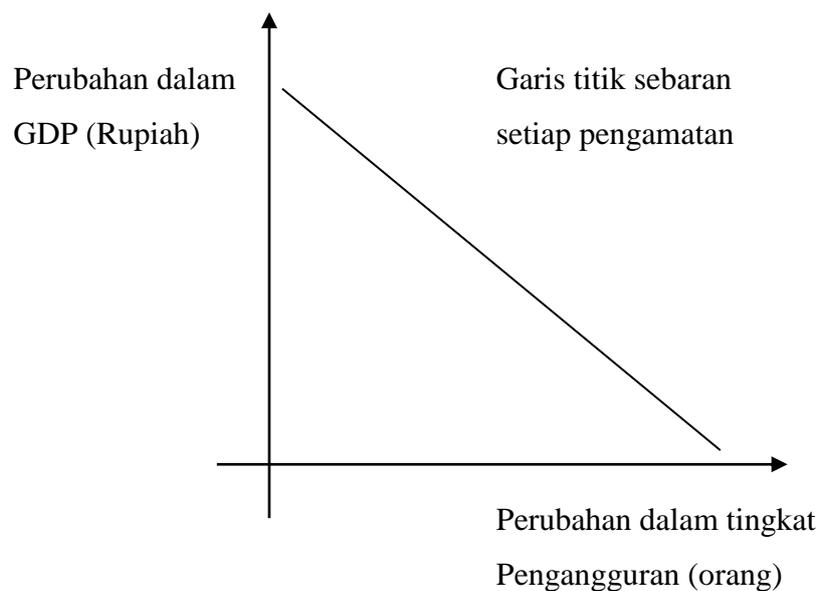
Pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan

nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

b. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pengangguran

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah.



Gambar 2.1: Kurva hubungan GDP dengan pengangguran (U) serta Hukum Okun.

Sumber: Teori Makro Ekonomi, (Mankiw, 2000: 432)

Seorang ahli ekonomi Okun memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, dimana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan perubahan tingkat pengangguran dan persentase GDP riil pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut

turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

8. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Menurut IskandarPutong (2008), inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga atas barang-barang secara umum dari waktu ke waktu secara kontiniu (terusmenerus). Tingkat kenaikan harga baru dikatakan sebagai inflasi bila kenaikan itu meluas dan mempengaruhi kenaikan harga untuk barang yang lain. Sehingga kenaikan harga untuk satu atau dua barang saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila telah mempengaruhi harga barang lainnya.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) menyatakan tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga baik indeks harga konsumen (IHK) maupun harga indeks produsen.

Selanjutnya menurut Lia Amalia (2007) menyatakan bahwa : inflasi adalah ciri yang pada umumnya dirasakan dan ditandai dengan adanya suasana harga barang yang tinggi secara mayoritas, dimana seolah-olah kita kehilangan keseimbangan antara daya beli dibandingkan dengan pendapatan sampai periode tertentu, biasanya dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

b. Metode Perhitungan Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari berbagai macam barang yang diperjual belikan di pasar masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai **Indeks Harga Konsumen (IHK atau *Consumer Price Index = CPI*)**. Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan **GNP atau PDB deflator**, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riil). (Putong, 2008)

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah :

$$\text{Inf} = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\% \quad \text{atau} \quad \text{Inf} = \frac{Df_n - Df_{n-1}}{Df_{n-1}}$$

Dimana :

Inf = tingkat inflasi

IHK_n = indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100),

IHK_{n-1} = indeks harga konsumen tahun berikutnya.

Df_n = GNP atau PDB deflator tahun berikutnya

Df_{n-1} = GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya)

c. Teori Inflasi

Menurut Putong (2008) menjelaskan 3 teori inflasi yaitu teori kuantitas, teori Keynes dan Teori strukturalis.

1) Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar baik uang kartal maupun uang giral. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang yang beredar, apabila dalam hal yang sangat darurat, kenaikan harga untuk sementara waktu saja. Penambahan uang seperti “bahan bakar” bagi api inflasi. Bila jumlah uang ditambah maka inflasi akan berhemti dengan sendirinya.

Inti teori kuantitas tentang uang dan harga adalah bahwa tingkat harga barang adalah sepadan dalam pertimbangannya terhadap jumlah pasokan uang. Teori kuantitas itu dalam wujud rumusan yang paling sederhana dinyatakan sebagai berikut : $MV = PT$

Dimana rumusan persamaan ini pada hakikatnya memang tidak lain adalah suatu tautology. Jumlah uang yang beredar dikalikan laju peredarannya (dalam jangka waktu tertentu) menunjukkan permintaan total (total demand) akan barang-barang. Teori kuantitas berdasarkan anggapan bahwa V keadaannya konstan atau

setidaknya stabil dalam jangka waktu yang pendek. Begitupula tentang T yang ditentukan oleh kapasitas produksi yang terpasang dalam suatu keadaan ekonomi tertentu.

2) Teori Keynes

Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi dalam teori ini menyoroti bagaimana perebutan bagian rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia yaitu bila $>S$ selama gap inflasi masih tetap ada maka besar kemungkinan inflasi dapat terjadi apabila kekuatan-kekuatan pendukung dalam perekonomian tidak digalakkan (misalnya kebijakan pemerintah dalam bentuk belanja pemerintah, kebijakan fiskal, kebijakan luar negeri dan lain sebagainya).

Proses perebutan iniakhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia sehingga timbul apa yang disebut dengan *inflationary gap* (celah inflasi). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah keinginannya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat ini, mungkin adalah pemerintah sendiri yang menginginkan bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan melakukan defisit anggaran belanja yang ditutup dengan mencetak uang baru. Golongan ini mungkin juga pihak swasta yang ingin melakukan investasi baru dan memperoleh dan pembiayaannya dari kredit bank.

3) Teori strukturalis

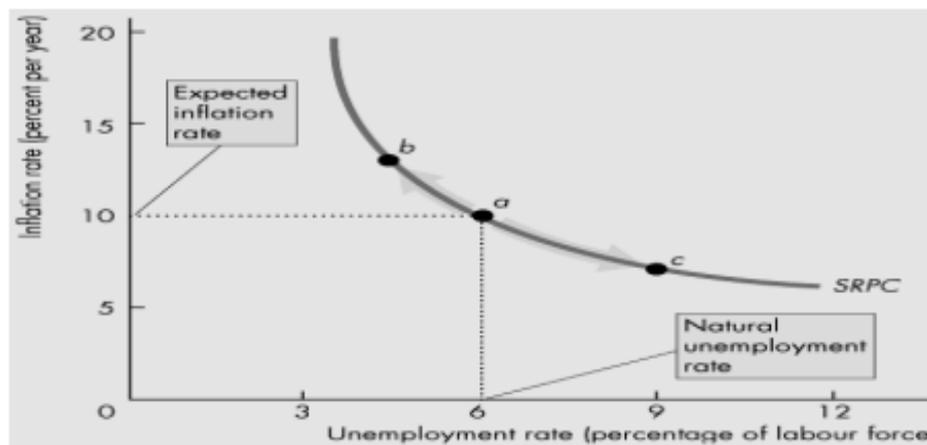
Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktur pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi.

Yang mana diketahui bahwa teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegangan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktur ini, pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga barang dan jasa meningkat. Teori inflasi yang sering digunakan namun yang cukup terkenal adalah teori kuantitas, dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

d. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Pada tahun 1958, ekonom A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel berjudul "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in United Kingdom 1861-1957". Pada artikel tersebut Phillips memperlihatkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi. Phillips memperlihatkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah

cenderung disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan sebaliknya tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung disertai dengan inflasi yang rendah (Samuelson, 2004)



Gambar 2.2 Kurva Philips (hubungan antara inflasi dan pengangguran)

A.W. Phillips (1958) dalam Mankiw (2012) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Karena tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) akan mengurangi pengangguran.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Model	Hasil
1	EDYSON SUSANTO, ENY ROCHAIDA DAN YAN ULFAH (2017) “Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan	Inflasi, tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan	Path Analisis	Inflasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Samarinda, Pendidikan berpengaruh langsung terhadap Pengangguran di Kota Samarinda, Inflasi berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Samarinda, Inflasi berpengaruh tidak langsung namun tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Kota Samarinda.
2	YURNALIS (2014) “Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Nagan Raya”	Inflasi dan Pengangguran	Regresi Linier Sekunder	Persamaan regresi diperoleh $Y = 7.84 + 0.067 + e$. Konstanta sebesar 7.848 yaitu menyatakan apabila variabel inflasi sama dengan nol maka jumlah pengangguran sebesar 40.298 jiwa. Koefisien determinasi (R^2) 0.31 menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran Kabupaten Nagan Raya sebesar 31.8 % sedangkan sisanya 68 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.
3	NADIA PURNAMA (2015) “Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Medan Tahun 2000-2014”	Inflasi dan Pengangguran	Regresi Linier Sekunder	Hasil pengolahan data didapat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kota Medan.
4	WARDA HARAHAN DAN NASIR BACHTIAR (2014) “Analisis Pengaruh	Pengangguran Terdidik, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel upah berpengaruh negatif terhadap

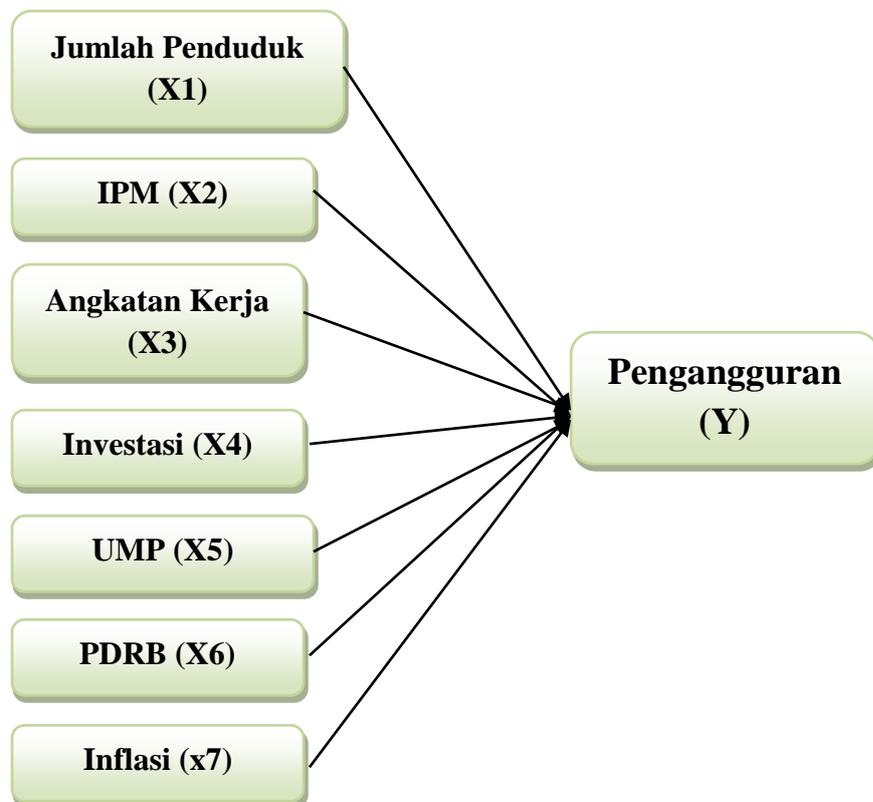
	Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Indonesia”	dan Upa		pengangguran terdidik Indonesia.
5	TENGKOE SARIMUDIN, R. B. D. A. SOEKARNOTO (2014) “Pengaruh PDRB, UMF, Inflasi, Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011”	Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi	Metode Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMF, Inflasi, dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMF berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
6	ROSYDA NUR FAUZIYAH (2018) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2010-2015”	Pengangguran, Inflasi, Upah minimum provinsi, penanaman modal dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil analisis, variabel inflasi secara individu pada $\alpha = 10\%$ mempunyai pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi pada $\alpha = 10\%$ mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keadaan suatu daerah. Upah minimum provinsi pada $\alpha = 10\%$ berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Dalam hal ini, pengangguran terbuka akan mengalami penurunan. Penanaman modal dalam negeri pada $\alpha = 10\%$ berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa.
7	DWI MAHROJI DAN IIN	IPM, investasi upah	Panel Regresi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan

	<p>NURKHASANAH</p> <p>“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten”</p>	<p>minimum dan Pengangguran</p>	<p>ess signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten (Da Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin kecil tingkat pengangguran.</p> <p>tubel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai investasi maka semakin kecil tingkat pengangguran.</p> <p>im 3.Variabel Upah Minimum Kabupaten/kota(UMK) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten/kota(UMK) maka semakin kecil tingkat pengangguran.</p> <p>ng; un; ka; Ch; wT; std; n; Ha; sm; n; Tes;)</p> <p>4.Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari besarnya nilai F- statistik yaitu 8.815659 dan nilai probabilitasnya sebesar $0.000002 < \alpha = 5\%$.</p>	
8	<p>ERNA A. PUSADJITA (2018)</p> <p>“FactorsthatInfluencetheRateofUnemploymentinIndonesia”</p>	<p>Angkatan kerja industriasi, tenaga kerja, upah minimum regional dan pengangguran</p>	<p>Deskriptif dan regresi linier berganda</p>	<p>Hasil pada $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja adalah signifikan untuk tingkat pengangguran di Indonesia Industrialisasi menunjukkan efek positif dan tidak penting bagi pengangguran itu berarti bahwa kemampuan sektor industri lebih rendah dalam mengurangi tingkat pengangguran dibandingkan sektor pertanian dan sektor jasa Elastisitas tenaga kerja adalah negatif dan tidak penting bagi</p>

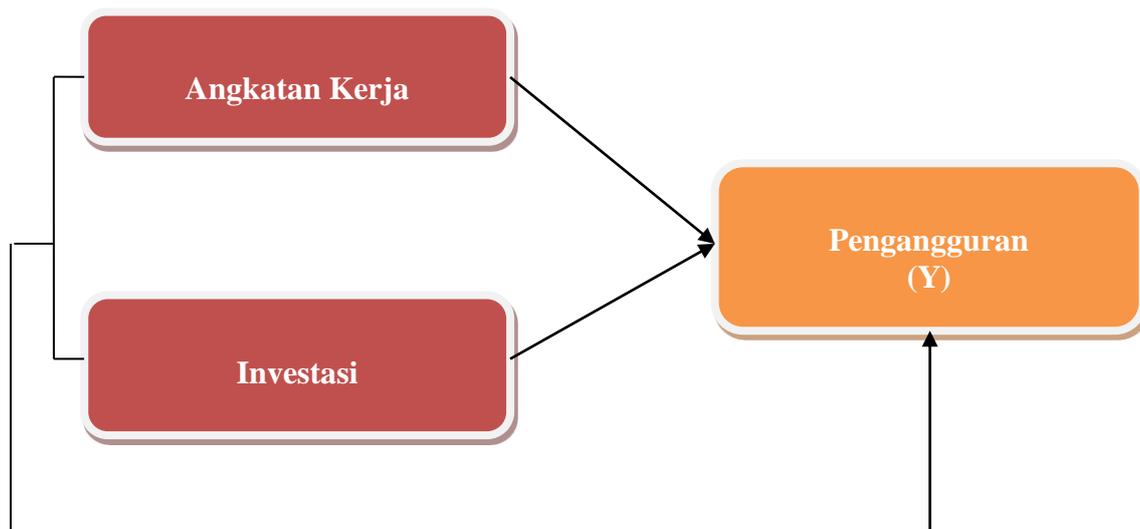
				<p>sektor pengangguran. Hasil da regresi menunjukkan bahwa elastisitas tenaga kerja tidak penting untuk tingkat pengangguran. Variabel tingkat upah Regional minimum menunjukkan efek negatif dan non-signifikan untuk tingkat pengangguran berarti bahwa tingkat upah tidak terlihat.</p>
9	<p>UMAR FARUK MUHAMMAD DAN JOSEPH DAVID (2019)</p> <p>“Relationship Between Poverty And Unemployment In Nigeria State”</p>	<p>Kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>Regresi logistik</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan proporsional antara kemiskinan dan pengangguran. Studi ini dengan demikian merekomendasikan tindakan para pembuat kebijakan dalam menciptakan program keterampilan kejuruan untuk membantu mengurangi masalah pengangguran di negara bagian. Oleh karenanya peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dan upah minimum juga disarankan.</p>
10	<p>NASRIDINI ALIDDIN AND BEHROOZ GHARLEGI (2015)</p> <p>“Factors Influencing High Unemployment in Tajikistan”</p>	<p>Pendidikan, upah dan pengangguran</p>	<p>Uji Regresi</p>	<p>Berdasarkan hasil regresi, ditemukan hubungan yang signifikan antara upah rendah dan kurangnya pendidikan terhadap pengangguran di Tajikistan. Meskipun demikian, kurangnya keterampilan memiliki hubungan yang kurang signifikan terhadap pengangguran di Tajikistan. Oleh karena itu, alasan utama untuk pengangguran menajadi tinggi di Tajikistan adalah kurangnya pendidikan dan sebagian besar warga negara dan upah rendah dibayarkan oleh majikan.</p>

A. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ada namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel lainnya secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini akan menganalisis Jumlah Penduduk, IPM, Angkatan Kerja, Investasi, UMP, PDRB, Inflasi terhadap Pengangguran di Sumatera Utara sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka CFA



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Regresi Linier Berganda

B. Hipotesis

Teori empirik yang dikemukakan oleh Umar (2008) sebagai berikut : Hipotesis adalah suatu proposisi, kondisi atau prinsip untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan menggunakan data empiris hasil penelitian.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Semua faktor-faktor (Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, Investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruton (PDRB) dan Inflasi) relevan dalam mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Sumatera Utara.